



**SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BIRO ORGANISASI**

**IKU  
(INDIKATOR KINERJA UTAMA)**

BIRO ORGANISASI  
TAHUN 2021-2026

---

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama Perangkat Daerah : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nama Perangkat Daerah : Membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.

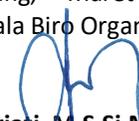
- Fungsi
- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana
  - b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana
  - c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana
  - d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Biorkrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya

Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline (2021)	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
1	Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	<p>Penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran                      OPD Tepat fungsi adalah OPD yang menjalankan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan (Tidak tumpang tindih).                      OPD tepat ukuran adalah OPD yang sesuai dengan volume beban kerja (Analisa beban kerja utama)</p> $\frac{\sum \text{OPD yg tepat fungsi dan ukuran}}{\sum \text{Jumlah OPD}} \times 100 =$	Bag. Kelembagaan
		Persentase Kab/Kota yg OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran	100	<p>Terbentuknya Perangkat Daerah Kab/Kota yang sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan serta peraturan peraturan perundang-undangan</p> $\frac{\sum \text{Kab/Kota yg OPDnya tepat fungsi dan ukuran}}{\sum \text{Kab/Kota}} \times 100 =$	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A	7	<p>Nilai saki / Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan indikator atau tolok ukur bagaimana tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang tercermin dari bagaimana pemerintah daerah tersebut mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP diperoleh dari penilaian terhadap 5 komponen SAKIP yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.                      Sama halnya dengan Pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dinilai bagaimana OPD tersebut menerapkan Sistem AKIP. Penilaian SAKIP di OPD dilakukan oleh Inspektorat Daerah setiap tahun. Nilai SAKIP A diperoleh oleh OPD yang nilainya &gt; 80</p> <p>Diukur berdasarkan jumlah OPD yang memperoleh nilai SAKIP &gt;80 dari hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja OPD dari Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada tahun n</p>	Inspektorat Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline (2021)	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
3	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda Prov Sumbar pada Evaluasi Sakip	11,7	<p>Nilai komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah merupakan salah satu komponen dari Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai SAKIP). Nilai komponen pelaporan kinerja ini berkontribusi 15% (Permen PANRB No. 12 Tahun 2015) terhadap nilai SAKIP secara keseluruhan.</p> <p>Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Kementerian PAN dan RB yang dilaksanakan pada tahun n (nilai pada komponen pelaporan kinerja)</p>	KemenPAN RB
4	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	-	Diukur berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Internal dari Provinsi Sumatera Barat dan Penilaian dari Tim Penilai Nasional yang dikeluarkan pada tahun berjalan.	Inspektorat / Kemenpan RB
5	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas	Jumlah Pelayanan Publik lolos saringan Kompetisi secara Nasional	5	<p>inovasi provinsi dan kabupaten/kota yang mengikuti seleksi kompetisi Inovasi Pelayanan publik secara nasional, yang telah lolos seleksi pada tingkat provinsi pada tahun n-1</p> <p>Jumlah Inovasi yang telah dinilai oleh tim penilai nasional</p>	Bagian Tatalaksana
6	Penataan Tatalaksana yang Efektif	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Penguatan Ketatalaksanaan	8	<p>Perangkat Daerah yang telah melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Proses Bisnis</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Proses Bisnis</p>	

Padang, Maret 2024  
Kepala Biro Organisasi



**Fitriati, M.Si, M.Si**

Nip. 19730524 199303 1 003